KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DAN KESEJAHTERAAN KORPORAT DI INDONESIA

DISERTASI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor

NINA FEBRIANA DOSINTA
B 3071181003

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi dengan judul :
Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat di Indonesia

ini diajukan oleh:

Nama : Nina Febriana Dosinta
NIM : B3071181003
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi :
Tanggal Ujian : 24 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Sidang Terbuka Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Dr. Jumhur, SE., M. Si NIP. 196709281997021001	24/02/2025	
Representative Guru Besar	Prof. Dr. Eddy Suratman, SE., MA NIP. 196707071992021001	24/02/2025	
Promotor	Prof. Fariastuti, SE., MA, Ph. D NIP. 196303171986032002	26/02/2025	
Ko-Promotor	Dr. Nella Yantiana, SE.,MM.,Ak,CA,CMA NIP. 197307311997022001	17/02/2025	
Ketua Penguji	Dr. Meiran Panggabean, SE., M. Si NIP. 196205251987031002	17/02/2025	
Anggota Penguji Eksternal	Prof. Faisal, SE., M. Si., Ph. D NIP. 197109042001121001	25/01/2025	
Anggota Penguji	Dr. Bustami, SE., M. Si NIP. 196206121989031004	17/02/2025	
Anggota Penguji	Dr. Windhu Putra, SE., M. Si NIP. 196404281989031004	14/02/2025	

Pontianak,
Mengetahui
Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
FEB UNTAN

Dr. Rosyadi, SE., M. Si
NIP. 196509211993031001

MAJELIS PENGUJI DISERTASI

Ketua Sidang : Dr. Jumhur, SE., M. Si

Tim Promotor

Promotor : Prof. Fariastuti, SE., MA, Ph. D

Ko-Promotor : Dr. Nella Yantiana, SE., MM, Ak, CA, CMA

Tim Oponen Ahli

Representative Guru Besar : Prof. Dr. Eddy Suratman, SE., MA

Ketua Penguji : Dr. Meiran Panggabean, SE., M. Si

Anggota Penguji Eksternal : Prof. Faisal, SE., M. Si., Ph. D

Anggota Penguji : Dr. Bustami, SE., M. Si

Anggota Penguji : Dr. Windhu Putra, SE., M. Si

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN TERBUKA DISERTASI
DISETUJUI PADA TANGGAL: Desember 2024

Oleh
Promotor

Fariastuti , S.E., M.A., Ph.D
NIP. 196303171986032002

Ko-Promotor

Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, CMA
NIP. 197307311997022001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak

Dr. Windhu Putra, S.E., M.S
NIP. 196404281989031004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA
Alamat: Jl. Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp. (0561) 571512, Fax (0561) 571513
Website: http//www.pascasarjanafe.untan.ac.id, Email: mm_feb@untan.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN TERBUKA DISERTASI



Nama	:	Nina Febriana Dosinta
NIM	:	B 3071181003
Program Studi	:	Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	
Judul	:	Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat di Indonesia

Menyatakan bahwa disertasi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diseminarkan. *

Dosen	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Promotor	Fariastuti, SE, MA, Ph.D	27/12/2024	
Ko-Promotor	Dr. Nella Yantiana, SE, MM, Ak, CA, CMA	27/12/2024	

- Mahasiswa wajib menunjukkan kepada dosen, LEMBAR PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT dengan lampiran hasil cetak pemeriksaan plagiat dari www.plagiarisma.net atau www.smallseotools.com

** Dosen sesuai konsentrasi bidang ilmu

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama	: Nina Febriana Dosinta
NIM	: B 3071181003
Jurusan	:
Program Studi	: Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:
Judul Disertasi	: Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber rujukan sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Disertasi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 27 Desember 2024



Nina Febriana Dosinta
NIM B 3071181003

PERTANGGUNGJAWABAN DISERTASI

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nina Febriana Dosinta**
NIM : B3071181003
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi :
Tanggal Ujian : 24 Januari 2025

Judul Disertasi :
Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat di Indonesia

Menyatakan bahwa Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Februari 2025

Nina Febriana Dosinta
B3071181003

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, atas rahmat serta hidayah ALLAH SWT, penulis dapat menyelesaikan disertasi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak.

Penulis dapat melengkapi disertasi dari berbagai arahan Majelis Penguji yakni Promotor, Ko-Promotor, Ketua Sidang, *Representative* Guru Besar, Ketua Penguji, Anggota Penguji Eksternal, dan Anggota Penguji, mulai dari tahap Ujian Kolokium, Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal, Ujian Tertutup, serta Ujian Terbuka.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Ibu Prof. Fariastuti, SE., MA, Ph. D selaku Promotor dan
Ibu Dr. Nella Yantiana, SE., MM, Ak, CA, CMA selaku Ko-Promotor
yang telah membimbing serta konstruktif membangun struktur disertasi.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

Bpk.Dr. Jumhur, SE., M. Si selaku Ketua Sidang,
Bpk.Prof. Dr. Eddy Suratman, SE., MA selaku *Representative* Guru Besar,
Bpk.Dr. Meiran Panggabean, SE., M. Si selaku Ketua Penguji,
Bpk.Prof. Faisal, SE., M. Si., Ph. D selaku Anggota Penguji Eksternal,
Bpk.Dr. Bustami, SE., M. Si dan Bpk. Dr. Windhu Putra, SE., M. Si selaku Anggota Penguji,
Bpk.Dr. Memet Agustiar, SE. MA terlibat sampai Penguji Proposal
yang telah memberikan arahan serta mengingatkan dalam mengisi kekurangan penulis,

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

Bpk. Rektor dan Bpk. Wakil Rektor yang telah memberikan dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana dalam melaksanakan dan menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.

Ibu Dekan dan Bpk. Wakil Dekan yang telah memberikan dukungan dalam pengembangan studi di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.

Ibu Ketua Jurusan, Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Bpk. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi yang telah memfasilitasi akademik, dan kelengkapan administrasi.

Bpk/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.

Ibu Ketua Jurusan , Bpk. Sekretaris Jurusan Akuntansi,
Ibu Koordinator Program Studi Akuntansi,
Ibu Koordinator Program Studi Magister Akuntansi
Bpk/Ibu Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi
yang telah memfasilitasi, mendukung penulis sebagai Dosen Akuntansi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.

International Conference on Business and Banking (ICBB);
Journal of Accounting Research, Organization and Economics (JAROE), dan Jurnal *Economia*
yang telah memberikan kepercayaan dalam publikasi dari isi disertasi.

Bpk/Ibu BPK RI yang telah memberikan kepercayaan dalam penggunaan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang telah turut serta merasakan perjuangan penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.

Kedua Orang Tua, Ayahanda Heru Sudarto dan Ibunda Mulyati,
Kedua Mertua, Ayahanda Yauhan Hasyim dan Ibunda Andriana Puspita,
Suami, Erick Ledwin Yonandre
Kedua anak, Syams Thariq Yonandre dan Naura Annisa Yonandre
Kedua Adik-adik, Rosa Dosinta, dan Liza Rezeki Dosinta,
Adik-adik Suami, Bextrina Vionenshi Yonandre, dan Clara Angelina Yonandre

Akhirnya. penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu demi satu dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.

Penulis

Nina Febriana Dosinta

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT, disertasi dengan judul **Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat di Indonesia** dapat diselesaikan. Penelitian ini memperkaya wawasan berkenaan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ilmu ekonomi. Dalam konteks makro, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teori kapabilitas manusia, dan teori pengeluaran publik. Dalam konteks mikro, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teori agensi.

Kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini dengan memperluas pembahasan kesejahteraan masyarakat dalam konteks makro pada pengeluaran pemerintah daerah, dan kesejahteraan korporat dalam konteks mikro pada BPD. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa kesejahteraan mencakup kesejahteraan masyarakat dalam konteks makro pada pengeluaran pemerintah daerah dan kesejahteraan korporat dalam konteks mikro pada BPD. Tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengawasan berperan pada kesejahteraan korporat. Pelaporan kesejahteraan korporat dalam konteks akuntansi keuangan dapat memperkaya literatur pelaporan korporat.

Berdasarkan hasil identifikasi keeratan hubungan, pemerintah daerah dan BPD dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai alternatif dalam membuat keputusan khususnya kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat.

Pontianak, Februari 2025

Nina Febriana Dosinta

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan korporat dengan pendekatan pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial dan hibah terhadap kesejahteraan masyarakat, (2) mengeksplorasi pengeluaran diskresioner, (3) menguji pengaruh komisaris independen dan direktur wanita terhadap kesejahteraan korporat, (4) menginvestigasi kondisi kesejahteraan korporat, (5) mengeksplorasi kredit yang diberikan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, dan (6) mengidentifikasi hubungan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia. Berdasarkan tujuan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan kausalitas, eksploratif, dan korelasional. Penelitian ini menggunakan 170 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan 130 Pelaporan Bank Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan *Human Development Index* sebagai proksi kesejahteraan masyarakat dan *Corporate Human Development Index* sebagai proksi kesejahteraan korporat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengujian terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif signifikan, dan hibah tidak berpengaruh (2) berdasarkan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia mengungkapkan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial tidak menunjukkan adanya alokasi untuk kegiatan politik. Kemudian, juga mengungkapkan bahwa bantuan keuangan, meskipun ada alokasi untuk kegiatan politik, namun tetap mengutamakan pemberdayaan masyarakat (3) pengujian terhadap kesejahteraan korporat menunjukkan bahwa komisaris independen dan direktur wanita berpengaruh positif signifikan (4) berdasarkan investigasi kondisi kesejahteraan korporat menunjukkan bahwa berkenaan 4 indikator yakni institusi, sosial/manusia, ekonomi, dan lingkungan, diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia (5) berdasarkan eksplorasi kredit, Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam menyalurkan kredit melalui pemberdayaan kapabilitas manusia untuk kesejahteraan masyarakat (6) berdasarkan identifikasi keeratan hubungan, terdapat hubungan yang lemah antara kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa kesejahteraan mencakup kesejahteraan masyarakat dalam konteks makro pada pengeluaran pemerintah daerah dan kesejahteraan korporat dalam konteks mikro pada Bank Pembangunan Daerah. Tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengawasan berperan pada kesejahteraan korporat. Pembahasan kesejahteraan masyarakat memperkaya kajian teori kapabilitas manusia dan pengeluaran publik. Pembahasan kesejahteraan korporat memperkaya kajian teori agensi.

Kata Kunci: indeks pembangunan manusia, kapabilitas manusia, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan korporat, tata kelola perusahaan

ABSTRACT

Human Development Index is a reflection of community welfare and corporate welfare with a human development approach. This research aims to (1) examine the influence of education spending, health spending, social protection spending, and grants on community welfare, (2) explore discretionary spending, (3) examine the influence of independent commissioners and female directors on corporate welfare, (4) investigate conditions corporate welfare, (5) exploring credit provided by Regional Development Banks in Indonesia, and (6) identifying the relationship between community welfare and corporate welfare in Indonesia. Based on the objectives, this research uses three approaches: causality, exploratory and correlational. This research uses one hundred seventy Regional Government Financial Reports audited by the Republic of Indonesia Financial Audit Agency and one hundred thirty Regional Development Bank Reports. This research uses the Human Development Index as a proxy for community welfare and the Corporate Human Development Index as a proxy for corporate welfare. The research results show that (1) testing of community welfare shows that education and health spending have a significant positive effect, while social protection spending has a significant negative effect, and grants have no effect (2) based on disclosures in the notes to financial reports in the Regional Government Financial Report in Indonesia revealed that spending on grants and social assistance does not indicate any allocation for political activities. Then, it was also revealed that financial assistance. However, there is an allocation for political activities, which still prioritizes community empowerment (3) testing of corporate welfare shows that independent commissioners and female directors have a significant positive effect (4) based on investigations of corporate welfare conditions show that regarding four indicators namely institutional, social/human, economic and environmental, disclosed in the annual report and sustainability report of Regional Development Banks in Indonesia (5) based on credit exploration provided by Regional Development Banks in Indonesia shows that Regional Development Banks in Indonesia channel credit through empowering capabilities humans for the welfare of society (6) based on the identification of close relationships, there is a relationship weak relationship between community welfare and corporate welfare in Indonesia. This study implies that welfare includes community welfare in the macro context of local government spending and corporate welfare in the micro context of Regional Development Banks. Corporate governance, as a monitoring mechanism, plays a role in corporate welfare. The discussion of community welfare enriches the study of human capability theory and public spending, and the discussion of corporate welfare enriches the study of agency theory.

Keywords: human development index, human capability, community welfare, corporate welfare, corporate governance

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KORPORAT DI INDONESIA

RINGKASAN

Latar Belakang

Pembangunan manusia berperan dalam mengoptimalkan kapabilitas manusia untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan manusia menitikberatkan pada manusia sebagai agen pembangunan, dengan mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki untuk kesejahteraan, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Fukuda-Parr, 2003; Sen, 1985; Sen, 1999a). Pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah lainnya berupa hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diklasifikasikan sebagai pengeluaran diskresioner untuk kesejahteraan masyarakat (Sjahrir et al., 2013).

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui pengeluaran pemerintah daerah, namun juga penyaluran kredit yang disalurkan bank daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Papua dan penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Papua untuk kesejahteraan masyarakat (Lembang, 2019). Ekspansi kredit konsumtif di Provinsi Papua mendorong rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Penyaluran kredit yang disalurkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui kredit konsumtif dan kredit produktif dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

BPD memiliki misi sebagai agen pembangunan yang dapat memantau kesejahteraan korporat dan keberlanjutan perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*/CG). CG merupakan salah satu mekanisme yang dapat memantau kesejahteraan dan keberlanjutan perusahaan melalui pengembangan kapabilitas manusia (Aras et al., 2018). Penerapan CG secara konsisten dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek pengawasan dalam peningkatan kinerja perusahaan, serta melindungi pemangku kepentingan termasuk kepentingan masyarakat (Bhasin & Shaikh, 2013; Rankin et al., 2012).

Penelitian ini penting dilakukan mengingat penelitian sebelumnya berkenaan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas dalam konteks makro. Hasil penelitian yang dilakukan di Nigeria dan di Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Edeme et al., 2017; Luthfia & Siregar, 2016). Kemudian, di Srilangka dan di Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Banik et al., 2022; Mongan, 2019). Berikutnya, penelitian yang dilakukan di negara berkembang termasuk Indonesia (Haile & Niño-Zarazúa, 2017) dan di Indonesia (Mailassa'adah et al., 2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian, penelitian berkenaan pengeluaran diskresioner telah dilakukan di berbagai negara, di antaranya di New Zealand yang dilakukan Marriott

& Miller, (2012) dan Kuzheliev et al. (2018) di Ukraina. Namun, belum banyak penelitian yang membahas pengeluaran diskresioner di Indonesia, padahal pengeluaran diskresioner berperan penting dalam mendukung perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja hibah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Deswantoro et al., 2017). Penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia belum mengkonfirmasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berkaitan dengan tingkat eksposur LKPD di Indonesia (Arifin, 2018).

IPM (*Human Development Index*/HDI) sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan korporat dengan pendekatan pembangunan manusia. Untuk mendeteksi kesejahteraan korporat, CHDI (*Corporate Human Development Index*) dibangun dari HDI. Spangenberg, (2016) membawa pendekatan pembangunan manusia ke tingkat perusahaan melalui CHDI berdasarkan pemikiran Sen, (1999b). Penelitian ini menggunakan pendekatan kapabilitas manusia, pengeluaran publik, dan teori agensi.

Masalah

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2014-2018 terdapat peningkatan IPM, persentase pengeluaran pemerintah dari total pengeluaran bidang pendidikan dengan konsistensi 20% serta perlindungan sosial 13,5%-24%, sedangkan untuk bidang kesehatan terdapat konsistensi 5% pada tahun 2016-2018 (BPS, 2021). Penelitian terdahulu berkenaan kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Uluwiyah, (2018) menunjukkan belanja pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia belum berdampak nyata terhadap program peningkatan kapabilitas manusia pada tahun 2014-2017. Kemudian, hasil penelitian Sajiah & Saputra, (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tidak efisien dalam membelanjakan anggaran kesehatan pada tahun 2016. Pengeluaran pemerintah lainnya yakni pengeluaran diskresioner berupa hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diklasifikasikan sebagai pengeluaran diskresioner (Sjahrir et al., 2013) yang diduga untuk kepentingan politik, namun ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui pengeluaran pemerintah daerah, namun juga penyaluran kredit yang disalurkan bank daerah. BPD sebagai bank daerah memiliki misi sebagai agen pembangunan yang dapat memantau kesejahteraan korporat dan keberlanjutan perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*/CG). Dalam konteks kesejahteraan korporat, studi terdahulu belum dibuktikan secara empiris khususnya berkenaan CG dengan kesejahteraan korporat. BPD perlu menggunakan nilai tambah sebagai tolok ukur kesejahteraan korporat, yakni CHDI sebagai cerminan kesejahteraan korporat.

Tujuan Penelitian

Sesuai arah dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial dan hibah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
2. Mengeksplorasi pengeluaran diskresioner di Indonesia.
3. Menguji pengaruh komisaris independen dan direktur wanita terhadap kesejahteraan korporat pada BPD di Indonesia.
4. Menginvestigasi kondisi kesejahteraan korporat pada BPD di Indonesia.
5. Mengeksplorasi kredit yang diberikan BPD di Indonesia.
6. Mengidentifikasi hubungan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia.

Kebaharuan

Kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini dengan memperluas pembahasan kesejahteraan masyarakat dalam konteks makro pada pengeluaran pemerintah daerah, dan kesejahteraan korporat dalam konteks mikro pada BPD.

Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memperkaya wawasan berkenaan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ilmu ekonomi. Dalam konteks makro, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teori kapabilitas manusia, dan teori pengeluaran publik. Dalam konteks mikro, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teori agensi. Pelaporan kesejahteraan korporat dalam konteks akuntansi keuangan dapat memperkaya literatur pelaporan korporat.

Kontribusi Empiris

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris. Pertama, memberikan penjelasan pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial, dan hibah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, memberikan penjelasan berkenaan pengeluaran diskresioner di Indonesia. Ketiga, memberikan penjelasan pengaruh komisaris independen dan direktur wanita terhadap kesejahteraan korporat. Keempat dan kelima, memberikan penjelasan berkenaan kesejahteraan korporat dan penyaluran kredit pada BPD di Indonesia. Kontribusi keenam, memberikan penjelasan keeratan hubungan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia.

Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai masukan bagi pemberi kebijakan dan BPD. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam pengalokasian belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hibah serta pengeluaran diskresioner khususnya berkenaan kesejahteraan masyarakat. Bagi BPD dan perusahaan di Indonesia, sebagai masukan dalam keterlibatan mekanisme CG berkenaan kesejahteraan korporat. Kemudian, bank dapat mengalokasikan

penyaluran kredit yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

Metode

Berdasarkan tujuan penelitian, maka menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan kausalitas, eksploratif, dan korelasional. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pelaporan BPD. Data pada periode tahun 2014-2018 yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi, (1) Data IPM yang bersumber dari web BPS, (2) Data belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja sosial, dan pengeluaran diskresioner, bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (3) Data pelaporan BPD yang bersumber dari laman masing-masing BPD.

Penelitian ini menggunakan 170 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan 130 Pelaporan Bank Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan *Human Development Index* sebagai proksi kesejahteraan masyarakat dan *Corporate Human Development Index* sebagai proksi kesejahteraan korporat.

Hasil

1. Hasil pengujian terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif signifikan dan hibah tidak berpengaruh. Temuan penelitian ini berkontribusi pada teori pengeluaran publik dan kapabilitas manusia berkenaan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yang telah dialokasikan berperan dalam mengoptimalkan kapabilitas manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja perlindungan sosial yang dialokasikan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat namun tidak optimal dalam mengembangkan kapabilitas manusia.
2. Berdasarkan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan pada LKPD di Indonesia mengungkapkan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial, tidak menunjukkan adanya alokasi untuk kegiatan politik. Kemudian, juga mengungkapkan bahwa bantuan keuangan, meskipun ada alokasi untuk kegiatan politik, namun tetap mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
3. Hasil pengujian terhadap kesejahteraan korporat menunjukkan komisaris independen dan direktur wanita berpengaruh positif signifikan. Tata Kelola perusahaan (*Corporate Governance*/CG) merupakan mekanisme dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan menjaga kepercayaan pemegang saham serta dapat berperan pada kesejahteraan korporat. Komisaris independen mengoptimalkan fungsi pengawasan dan mendeteksi pengungkapan kesejahteraan korporat dalam pelaporan perusahaan. Kemudian, direktur perempuan sebagai *agent* mengoptimalkan kapabilitas untuk mendukung *principal* dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk kesejahteraan korporat.

CG, melalui komisaris independen dan direktur wanita, merupakan bentuk pengawasan di dalam perusahaan, termasuk mengenai informasi kesejahteraan korporat dalam laporan tahunan dan keberlanjutan.

4. Berdasarkan investigasi kondisi kesejahteraan korporat melalui CHDI menunjukkan bahwa berkenaan 4 indikator yakni institusi, sosial/manusia, ekonomi, dan lingkungan, diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan BPD di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat keselarasan dengan teori kapabilitas manusia. CHDI sebagai bentuk pendeteksian kesejahteraan korporat dengan menyelaraskan kapabilitas manusia untuk mendukung realisasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Berdasarkan eksplorasi kredit yang diberikan BPD menunjukkan bahwa BPD dalam menyalurkan kredit melalui pemberdayaan kapabilitas manusia untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi mikro sebagai bagian dari kredit produktif untuk kesejahteraan masyarakat. BPD mengutamakan inovasi teknologi dalam kegiatan transaksi, antara lain dalam penyaluran kredit. BPD menempatkan teknologi sebagai elemen utama dan pengembangan digital produk yang menunjukkan bahwa Program Transformasi BPD dapat meningkatkan kemampuan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Pada pelaporan BPD menunjukkan bahwa melalui program transformasi menjadikan BPD tidak hanya memiliki daya saing yang tinggi serta kuat namun juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan serta pemerataan ekonomi daerah di Indonesia.
6. Berdasarkan identifikasi keeratan hubungan, terdapat hubungan yang lemah antara kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia. Walaupun menunjukkan lemahnya keeeratan hubungan, namun kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan korporat sebagai wujud dalam merealisasikan SDGs di Indonesia.

Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif signifikan, dan hibah tidak berpengaruh. Para pembuat kebijakan dapat menerapkan rekomendasi yakni; Pertama, belanja pendidikan menekankan pada peningkatan kemampuan manusia, khususnya teknologi. Kedua, menjaga pengeluaran kesehatan dalam mendukung kapabilitas manusia yang telah berjalan dengan baik. Ketiga, belanja perlindungan sosial dan hibah lebih difokuskan pada peningkatan kapabilitas manusia. Keempat, kebijakan pemerintah diperlukan untuk memfokuskan pada belanja perlindungan sosial dan hibah yang dapat meningkatkan kapabilitas manusia. Belanja perlindungan sosial yang merupakan salah satu dari pemenuhan kebutuhan dasar seyogyanya dapat lebih optimal. Hibah sebagai belanja yang tidak termasuk pemenuhan kebutuhan dasar perlu dioptimalkan dengan lebih menekankan pada peningkatan kapabilitas manusia.
2. Berdasarkan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan pada LKPD di Indonesia mengungkapkan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial, tidak

menunjukkan adanya alokasi untuk kegiatan politik. Petahana yang memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan pengeluaran diskresioner sebagai upaya dalam menarik simpati pemilih dapat lebih memfokuskan pada peningkatan kapabilitas manusia. Bantuan keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan politik dapat lebih mengoptimalkan dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap kesejahteraan korporat menunjukkan komisaris independen dan direktur wanita berpengaruh positif signifikan. BPD dapat memperhatikan dan mengimplementasikan regulasi tata kelola perusahaan untuk dapat mempertahankan kesejahteraan korporat.
4. Berdasarkan hasil investigasi kondisi kesejahteraan korporat melalui pelaporan BPD, Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan kodifikasi kesejahteraan korporat.
5. Berdasarkan hasil eksplorasi kredit yang diberikan BPD di Indonesia, perusahaan perbankan dapat mempertimbangkan penyaluran kredit yang dialokasikan untuk lebih mengoptimalkan kapabilitas manusia.
6. Berdasarkan hasil identifikasi keeratan hubungan, pemerintah daerah dan BPD dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai alternatif dalam membuat keputusan khususnya kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat.

Implikasi Teoritis

1. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa kesejahteraan mencakup kesejahteraan masyarakat dalam konteks makro pada pengeluaran pemerintah daerah dan juga kesejahteraan korporat dalam konteks mikro pada BPD.
2. Pembahasan kesejahteraan masyarakat memperkaya kajian berkenaan teori kapabilitas manusia dan pengeluaran publik. Pembahasan kesejahteraan korporat memperkaya kajian berkenaan teori agensi.

Implikasi Praktis

1. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, hasil penelitian ini berdampak pada pengambilan keputusan mengenai belum optimalnya pengeluaran perlindungan sosial dalam mengembangkan kapabilitas manusia.
2. Dalam konteks kesejahteraan korporat, hasil penelitian ini berdampak pada pengambilan keputusan khususnya CG yang menunjukkan bahwa komisaris independen dan direktur wanita sebagai bagian dari CG yang berperan terhadap kesejahteraan korporat.

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan IPM (HDI) sebagai proksi kesejahteraan masyarakat, dan menggunakan CHDI sebagai proksi kesejahteraan korporat.
2. Penelitian ini menggunakan konten analisis dalam menginvestigasi kesejahteraan korporat, sehingga memunculkan subjektivitas dalam hasil analisis.

Rencana Riset Mendatang

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan wawancara untuk menginvestigasi secara langsung berkenaan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan korporat.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis independen untuk meminimalkan subjektivitas dalam konten analisis.

COMMUNITY WELFARE AND CORPORATE WELFARE IN INDONESIA

SUMMARY

Background

Human development plays a role in optimizing human capabilities to realize welfare. Human development emphasizes humans as agents of development, by optimizing their capabilities for welfare, which is reflected in the Human Development Index (HDI) (Fukuda-Parr, 2003; Sen, 1985; Sen, 1999a). The government allocates spending on education, health, and social protection to fulfill basic needs in realizing community welfare and supporting human development. Other government spending in grants, social assistance and financial assistance are classified as discretionary spending for community welfare (Sjahrir et al., 2013). Community welfare can be realized through regional government spending and credit distribution channeled by regional banks. The results of the study show that regional government spending in Papua Province and credit distribution provided by Bank Papua for community welfare (Lembang, 2019). Expanding consumer credit in Papua Province encourages households to meet various needs, such as better education and health services. Credit distribution channeled by Regional Development Banks (BPD) through consumer credit and productive credit can support community welfare.

BPD has a mission as a development agent that can monitor corporate welfare and corporate sustainability through Corporate Governance (CG). CG is one of the mechanisms that can monitor corporate welfare and sustainability through human capability development (Aras et al., 2018). The consistent and sustainable implementation of CG is one aspect of supervision in improving corporate performance, as well as protecting stakeholders, including community interests (Bhasin & Shaikh, 2013; Rankin et al., 2012).

This research is important considering that previous research on government spending on public welfare is still limited in a macro context. The results of research conducted in Nigeria and Indonesia show that government spending on education affects public welfare (Edeme et al., 2017; Luthfia & Siregar, 2016). Then, in Sri Lanka and in Indonesia it shows that government spending on health affects public welfare (Banik et al., 2022; Mongan, 2019). Next, research conducted in developing countries, including Indonesia (Haile & Niño-Zarazúa, 2017) and Indonesia (Mailassa'adah et al., 2019), shows that government spending on social protection has an effect on public welfare. Then, research on discretionary spending has been conducted in various countries, including in New Zealand by Marriott & Miller, (2012) and Kuzheliev et al. (2018) in Ukraine. However, there are not many studies that discuss discretionary spending in Indonesia, even though discretionary spending plays an important role in supporting the economy and realizing community welfare. The study results showed that grant spending did not affect the community's welfare in the Regency/City in West Kalimantan Province

(Deswantoro et al., 2017). Previous studies regarding local government spending in Indonesia have not confirmed the Regional Government Financial Report (LKPD) that has been audited by the Republic of Indonesia Audit Board (BPK RI). The study results showed that the HDI is related to the level of LKPD exposure in Indonesia (Arifin, 2018).

IPM (Human Development Index/HDI) reflects community welfare and corporate welfare with a human development approach. To detect corporate welfare, CHDI (Corporate Human Development Index) is built from HDI. Spangenberg (2016) brings the human development approach to the company level through CHDI based on Sen's thinking (1999b). This study uses the human capability approach, public expenditure, and agency theory.

Problems

In the context of community welfare, in 2014-2018, there was an increase in the Human Development Index, the percentage of government spending from total education spending with a consistency of 20% and social protection of 13.5% - 24%, while for the health sector, there was a consistency of 5% in 2016-2018 (BPS, 2021). Previous research regarding community welfare has shown mixed results. The results of Uluwiyah's research (2018) showed that education spending issued by the Indonesian government did not really impact human capability improvement programs in 2014-2017. Then, Sajiah and Saputra's study (2019) showed that most provinces in Indonesia were inefficient in spending the health budget in 2016. Other government spending, namely discretionary spending in the form of grants, social assistance, and financial assistance, is classified as discretionary spending (Sjahrir et al., 2013), which is suspected of being for political interests but is intended for community welfare. Community welfare can be realized through regional government spending and credit distribution channeled by regional banks. RDBs, as regional banks, have a mission as development agents that can monitor corporate welfare and sustainability through corporate governance (CG). Previous studies have not been empirically proven in corporate welfare, especially regarding CG with corporate welfare. BPD needs to use added value as a benchmark for corporate welfare, namely CHDI, to reflect corporate welfare.

Purpose

This research aims to

1. *Examine the influence of education spending, health spending, social protection spending, and grants on community welfare,*
2. *Explore discretionary spending,*
3. *Examine the influence of independent commissioners and female directors on corporate welfare in BPD,*
4. *Investigate the condition of corporate welfare in BPD*
5. *Explores the credit provided by BPD in Indonesia, and*
6. *Identifies the relationship between community welfare to corporate welfare in Indonesia.*

Novelty

The novelty offered in this research is by expanding not only the discussion of community welfare in the macro context of regional government expenditure, but also includes corporate welfare in the micro context of RDBs.

Theoretical Contribution

This study enriches insight into community welfare in the context of economics. In a macro context, it contributes to the development of science, especially the theory of human capabilities and the theory of public expenditure. In a micro context, it contributes to the development of science, especially agency theory. Corporate welfare reporting in the context of financial accounting can enrich the literature on corporate reporting.

Empirical Contribution

This study provides empirical contributions. First, it explains the influence of education, health, social protection, and grants on community welfare. Second, it explains discretionary spending in Indonesia. Third, it explains the influence of independent commissioners and female directors on corporate welfare. Fourth and fifth, it explains corporate welfare and credit distribution to RDBs in Indonesia. The sixth contribution is to explain the close relationship between community welfare and corporate welfare in Indonesia.

Practical Contribution

This study provides practical input for policymakers and RDBs. It provides input for the government in allocating education, health, social protection, grant spending, and discretionary spending, especially regarding community welfare. For RDBs and companies in Indonesia, it provides input in the involvement of CG mechanisms regarding corporate welfare. Then, banks can allocate appropriate credit distribution according to the needs of optimizing community welfare.

Methods

Based on the research objectives, three approaches were used: causality, exploratory, and correlational. This research uses Regional Government Financial Reports (LKPD) audited by the BPK RI and RDBs Reporting. The data for the 2014-2018 period analyzed in this research is secondary data, which includes (1) HDI data sourced from the BPS website, (2) Data on education spending, health spending, social spending, and discretionary spending sourced from the Regional Government Financial Reports that have been audited by the Republic of Indonesia Financial Audit Agency, and (3) RDBs reporting data sourced from each RBD's website.

This research uses one hundred seventy Regional Government Financial Reports audited by the Republic of Indonesia Financial Audit Agency and one hundred thirty Regional Development Bank Reports. This research uses the Human Development Index as a proxy for community welfare and the Corporate Human Development Index as a proxy for corporate welfare.

Result

1. *The test results on community welfare show that education and health spending have a significant positive effect. In contrast, social protection spending has a significant negative effect, and grants have no effect. The findings of this study contribute to the theory of public expenditure and human capabilities regarding government spending in the education and health sectors. The results of this study indicate that the realization of government spending in the education and health sectors that have been allocated plays a role in optimizing human capabilities to realize community welfare. The results of this study indicate that the realization of allocated social protection spending plays a role in realizing community welfare but is not optimal in developing human capabilities.*
2. *The disclosure in the notes to the financial statements in the LKPD in Indonesia reveals that grant and social assistance spending do not show any allocation for political activities. Then, it also reveals that although financial assistance is allocated for political activities, it still prioritizes community empowerment.*
3. *The test results on corporate welfare show that independent commissioners and female directors have a significant positive effect. Corporate governance (CG) is a mechanism for supervising the company's operational activities and maintaining shareholder trust, and it can play a role in corporate welfare. Independent commissioners optimize the supervisory function and detect corporate welfare disclosures in corporate reporting. Then, female directors as agents optimize capabilities to support principals in improving company performance for corporate welfare. CG, through independent commissioners and female directors, is a form of supervision within the company, including corporate welfare information in annual and sustainability reports.*
4. *The investigation of corporate welfare conditions through CHDI shows that four indicators, namely institutions, social/human, economic, and environmental, are disclosed in the annual report and sustainability report of BPD in Indonesia. The results of this study show that they align with the theory of human capabilities. CHDI is a form of corporate welfare detection that aligns human capabilities to support realizing Sustainable Development Goals (SDGs).*
5. *Based on the credit exploration provided by RDBs shows that RDBs distribute credit by empowering human capabilities for community welfare. Empowerment of micro-economics as part of productive credit for community welfare. RDBs prioritizes technological innovation in transaction activities, including credit distribution. RDBs place technology as the central element in the development of digital products, which shows that the RDBs Transformation Program can increase the ability to support regional economic development and contribute to regional development. The RDBs report shows that through the transformation program, RDBs have high and strong competitiveness and can contribute to the growth and equality of the regional economy in Indonesia.*

6. *Based on the identification of the closeness of the relationship, there is a weak relationship between community welfare and corporate welfare in Indonesia. Although it shows a weak closeness of the relationship, community welfare and corporate welfare are manifestations of realizing the SDGs in Indonesia.*

Recommendation

1. *Research on community welfare shows that education and health spending have a significant positive effect. In contrast, social protection spending has a significant negative effect, and grants have no effect. Policymakers can implement the following recommendations: First, education spending emphasizes improving human capabilities, especially technology, and second, maintaining health spending to support human capabilities that are already running well. Third, social protection spending and grants focus more on improving human capabilities. Fourth, government policies must focus on social protection spending and grants that can improve human capabilities. Social protection spending, which is one of the fulfillment of basic needs, should be more optimal. Grants, as spending not included in the fulfillment of basic needs, need to be optimized by emphasizing improving human capabilities.*
2. *The disclosure in the notes to the financial statements in the LKPD in Indonesia reveals that grant spending and social assistance do not show any allocation for political activities. Incumbents who use discretionary spending to attract voter sympathy can focus more on improving human capabilities. Financial assistance allocated for political activities can be more optimal for community empowerment.*
3. *The results of testing on corporate welfare show that independent commissioners and female directors have a significant positive effect. RDBs can pay attention to and implement corporate governance regulations to maintain corporate welfare.*
4. *Based on the results of the investigation of corporate welfare conditions through RDDs reporting, the Financial Services Authority and companies can consider using corporate welfare codification.*
5. *Based on the results of credit exploration provided by RDBs in Indonesia, banking companies can consider distributing credit allocated to further optimize human capabilities.*
6. *Based on the results of the identification of close relationships, local governments and RDBs can consider this study's results as an alternative to making decisions, especially when combining community welfare with corporate welfare.*

Theoretical Implications

1. *This study implies that welfare includes community welfare in the macro context of local government spending and also corporate welfare in the micro context of RDBs.*

2. *The discussion of community welfare enriches the study of human capability theory and public spending. The discussion of corporate welfare enriches the study of agency theory.*

Practical Implications

1. *In the context of social welfare, the results of this study have an impact on decision-making regarding the suboptimal spending on social protection in developing human capabilities.*
2. *In the context of corporate welfare, the results of this study have an impact on decision-making, especially corporate governance, which shows that independent commissioners and female directors are part of corporate governance that plays a role in corporate welfare.*

Limitations

1. *This study uses HDI as a proxy for community welfare and uses CHDI as a proxy for corporate welfare.*
2. *This study uses content analysis to investigate corporate welfare, thus giving rise to subjectivity in the analysis results.*

Future Research Plans

1. *Further research can use an interview approach to directly investigate community and corporate welfare.*
2. *Further research can use independent analysis to minimize subjectivity in the content of the analysis.*

DAFTAR ISI

Bagian **Halaman**

Pengesahan Disertasi i
Majelis Penguji Disertasi ii
Persetujuan Ujian Terbuka Disertasi iii
Pernyataan Orisinalitas Disertasi iv
Pertanggungjawaban Disertasi v
Ucapan Terima Kasih vi
Kata Pengantar viii
Abstrak ix
Abstract x
Ringkasan xi
Summary xviii
Daftar Isi xxiv
Daftar Tabel xxvii
Daftar Gambar xxviii
Daftar Lampiran xxix
Daftar Singkatan xxx

BAB 1

PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.2.1. Pernyataan Masalah 5
1.2.2. Pertanyaan Penelitian 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Kontribusi Penelitian 6
1.4.1. Kontribusi Teoritis 6
1.4.2. Kontribusi Empiris 7
1.4.3. Kontribusi Praktis 7
1.5. Ruang Lingkup 8

BAB 2

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN PENYALURAN KREDIT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA 10

2.1. Kondisi Sosial Ekonomi 10

2.2. Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah 21

BAB 3

TELAAH PUSTAKA 25

3.1. Landasan Teori 25

3.1.1. Teori Kapabilitas Manusia 25

3.1.2. Teori Pengeluaran Publik 26

3.1.3. Teori Agensi 27

3.2. Kajian Empiris 28

3.2.1. Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Perlindungan Sosial, dan Belanja Hibah terhadap Kesejahteraan Masyarakat 28

3.2.2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kesejahteraan Korporat 30

3.3. Kerangka Konseptual 32

3.4. Hipotesis Penelitian 33

3.5. Uji Signifikansi 33

BAB 4

METODE PENELITIAN 34

4.1. Pendekatan Penelitian 34

1.2.1. Desain Penelitian Kausalitas 34

1.2.2. Desain Penelitian Eksploratif 34

1.2.3. Desain Penelitian Korelasional 35

4.2 Data Penelitian 35

4.3. Metode Analisis Data 36

4.4. Definisi Operasional Variabel 38

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN **41**

5.1. Hasil 41

5.1.1. Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Perlindungan Sosial, dan Belanja Hibah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia 41

5.1.2. Eksplorasi Pengeluaran Diskresioner di Indonesia 44

5.1.3. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kesejahteraan Korporat 47

5.1.4. Eksplorasi Kondisi Kesejahteraan Korporat pada BPD di Indonesia 51

5.1.5. Eksplorasi Penyaluran Kredit yang diberikan BPD di Indonesia 69

5.1.6. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat di Indonesia 75

5.2. Pembahasan 75

5.2.1. Teori Pengeluaran Publik dan Kapabilitas Manusia 75

5.2.2. Teori Agensi dan Kapabilitas Manusia 80

BAB 6

PENUTUP **84**

6.1. Simpulan 84

6.2. Rekomendasi 86

6.3. Implikasi 87

6.3.1. Implikasi Teoritis 87

6.3.2. Implikasi Praktis 87

6.4. Keterbatasan 88

6.5. Rencana Riset Mendatang 88

Daftar Rujukan 89

Lampiran 112

DAFTAR TABEL

TABEL **Halaman**

Tabel 1.1. Realisasi Pengeluaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2021 di Indonesia.....2

Tabel 2.1. Indikator Ekonomi Indonesia.....10

Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2014-2018.....12

Tabel 2.3. PDRB per Kapita di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2014-2018.....14

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2014-2018.....16

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2014-2018.....17

Tabel 2.6. IPM Berdasarkan Pulau Tahun 2014-2018.....19

Tabel 2.7. Indikator Kinerja Bank Pembangunan Daerah Tahun 2014-2021.....22

Tabel 5.1. Statistik Deskriptif Kesejahteraan Masyarakat.....41

Tabel 5.2. Hasil *Chow-Test*, *Hausman-Test*, dan *Langrange Multiplier Test* Kesejahteraan Masyarakat.....42

Tabel 5.3. Hasil Regresi Berganda Kesejahteraan Masyarakat.....42

Tabel 5.4. Statistik Deskriptif Kesejahteraan Korporat.....47

Tabel 5.5. Hasil *Chow-Test*, *Hausman-Test*, dan *Langrange Multiplier Test* Kesejahteraan Korporat.....47

Tabel 5.6. Hasil Pengujian Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas Pada Kesejahteraan Korporat.....48

Tabel 5.7. Hasil Regresi Berganda Kesejahteraan Korporat.....48

Tabel 5.8. Proporsi Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif Bank Pembangunan Daerah.....70

Tabel 5.9. Tipologi Distribusi Kredit Tahun 2018.....74

Tabel 5.10. Hasil Pengujian Korelasional Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat.....75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR **Halaman**

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual 32
Gambar 5.1. Proporsi Biaya Operasional Sekolah dalam Belanja Hibah 44
Gambar 5.2. Proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik 45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN **Halaman**

Lampiran 1 Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat tahun 2014 112
Lampiran 2 Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat tahun 2015 113
Lampiran 3 Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat tahun 2016 114
Lampiran 4 Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat tahun 2017 115
Lampiran 5 Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Korporat tahun 2018 116
Lampiran 6 Hasil Regresi Linear Berganda Kesejahteraan Masyarakat 117
Lampiran 7 Hasil Regresi Linear Berganda Kesejahteraan Korporat 118
Lampiran 8 Data Pengujian Regresi Linear Berganda Kesejahteraan Masyarakat 119
Lampiran 9 Data Pengujian Regresi Linear Berganda Kesejahteraan Korporat 124
Lampiran 10 Statistik Deskriptif Kesejahteraan Masyarakat 128
Lampiran 11 Statistik Deskriptif Kesejahteraan Korporat 129

DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: *Corporate Social Responsibility*
CHDI	: *Corporate Human Development Index*
CG	: *Corporate Governance*
GCG	: *Good Corporate Governance*
HDI	: *Human Development Index*
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
ROA	: *Return on Assets*
RDBs	: *Regional Development Banks*
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDGs	: *Sustainable Development Goals*

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia berperan dalam mengoptimalkan kapabilitas manusia untuk mewujudkan kesejahteraan. Manusia sebagai sasaran pembangunan yang berperan penting dalam kesejahteraan (Sušnik & Zaag, 2017), sekaligus sebagai indikator kesejahteraan suatu negara (UNDP, 1990). Pembangunan manusia menitikberatkan pada manusia sebagai agen pembangunan (Fukuda-Parr, 2003), dengan mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki untuk kesejahteraan (Sen, 1999a), yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Sen, 1985). Dalam kategori negara berkembang, posisi IPM Indonesia berada pada peringkat 107 dari 189 negara pada tahun 2019 (UNDP, 2020).

Pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan manusia. Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2014-2021 bahwa IPM mengalami peningkatan 68,90-73,16 dan persentase pengeluaran pemerintah dari total pengeluaran bidang pendidikan terdapat konsistensi 20% serta perlindungan sosial 13,5%-24%, sedangkan untuk bidang kesehatan terdapat konsistensi 5% pada tahun 2016-2018 (BPS, 2021). Namun, hasil penelitian Uluwiyah, (2018) menunjukkan belanja pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia belum berdampak nyata terhadap program peningkatan kapabilitas manusia pada tahun 2014-2017. Padahal, walaupun terdapat konsistensi persentase 20% dari total pengeluaran, namun terdapat kenaikan realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tahun 2014-2016, kemudian penurunan tahun 2016-2017. Begitu juga dalam bidang kesehatan, terdapat konsistensi dengan persentase 5% pada tahun 2016-2018 dan realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengalami kenaikan tahun 2014-2018. Namun, hasil penelitian Sajiah & Saputra, (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tidak efisien dalam membelanjakan anggaran kesehatan pada tahun 2016. Berikutnya, pada perlindungan sosial, walaupun terdapat

peningkatan pengeluaran pemerintah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, namun persentase berfluktuatif dengan interval 13,5%-24%. Berdasarkan Tabel 1.1. berkenaan pengeluaran realisasi pengeluaran perlindungan sosial menunjukkan terdapat perubahan penurunan pada tahun 2014-2015, namun mengalami kenaikan dari tahun 2015-2016.

Tabel 1. 1

Realisasi Pengeluaran Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial

dan Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2014-2021

di Indonesia

Tahun	Pengeluaran Pendidikan			Pengeluaran Kesehatan			Pengeluaran Perlindungan Sosial			IPM
	Milyar Rp	Δ Milyar Rp	%	Milyar Rp	Δ Milyar Rp	%	Milyar Rp	Δ Milyar Rp	%	
2014	131.314	-	-	13.078	-	-	8.063	-	24	68,90
2015	146.393	15.079	20	21.113	8.035	3,8	8.319	(256)	13,7	69,55
2016	150.090	3.697	20	67.214	65.101	5	158,089 Milyar	149.770	13,6	70,18
2017	143.134	(6.956)	20	61.724	5.490	5	157.689	400	13,5	70,81
2018	147.562	4.428	20	65.066	3.342	5	162.557	4.868	15,6	71,39
2019	152.690	5.128	20	62.758	(2.308)	5	200.801	38.244	15,5	71,92
2020	156.894	4.204	20	61.14	(1.618)	7,8	226.416	25.609	19,2	72,81
2021	175.236	18.342	20	111.66	50.52	6,2	260.063	33.653	16,8	73,16

Sumber: Kementerian Keuangan (2021) & BPS (2019)

Pengeluaran pemerintah lainnya berupa hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diklasifikasikan sebagai pengeluaran diskresioner (Sjahrir et al., 2013). Sebagai petahana, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan berkeinginan kembali menjadi calon kepala daerah kemungkinan akan cenderung menggunakan dana kebijakan yakni pengeluaran diskresioner dalam meningkatkan popularitas agar terpilih kembali pada periode berikutnya (Sjahrir et al., 2013). Akibatnya, dana tersebut dapat digunakan petahana untuk memikat hati masyarakat pemilih dalam

mendapatkan dukungan (Ritonga & Alam, 2010; Sjahrir et al., 2013). Walaupun pengeluaran diskresioner yang diduga untuk kepentingan politik, namun ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui pengeluaran pemerintah daerah, namun juga penyaluran kredit yang disalurkan bank daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Papua dan penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Papua untuk kesejahteraan masyarakat (Lembang, 2019). Ekspansi kredit konsumtif di Provinsi Papua mendorong rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Penyaluran kredit yang disalurkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui kredit konsumtif dan kredit produktif dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Penyaluran kredit konsumtif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya kesejahteraan masyarakat (Laratmase, et al 2024). BPD memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan pencapaian program pemerintah daerah melalui penyaluran kredit produktif kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Berly, et al 2022).

BPD melalui Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) terus memperkuat sinergi BPD dalam mengoptimalkan peran BPD memajukan perekonomian daerah (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, 2022). BPD memiliki misi sebagai agen pembangunan yang dapat memantau kesejahteraan korporat dan keberlanjutan perusahaan melalui Corporate Governance (CG). CG merupakan salah satu mekanisme yang dapat memantau kesejahteraan dan keberlanjutan perusahaan melalui pengembangan kapabilitas manusia (Aras et al., 2017). Penerapan CG secara konsisten dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek pengawasan dalam peningkatan kinerja perusahaan, serta melindungi pemangku kepentingan termasuk kepentingan masyarakat (Rankin et al., 2012; Bhasin & Shaikh, 2013).

Penelitian ini penting dilakukan mengingat penelitian sebelumnya berkenaan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas dalam

konteks makro. Penelitian yang dilakukan di Nigeria dan di Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Edeme et al., 2017; Luthfia & Siregar, 2016). Kemudian, di Srilangka dan di Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Banik et al., 2022; Mongan, 2019). Berikutnya, penelitian yang dilakukan di negara berkembang termasuk Indonesia (Haile & Niño-Zarazúa, 2017) dan di Indonesia (Mailassa'adah et al., 2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, penelitian berkenaan pengeluaran diskresioner telah dilakukan di berbagai negara, di antaranya di New Zealand yang dilakukan Marriott & Miller, (2012) dan Kuzheliev et al. (2018) di Ukraina. Namun, belum banyak penelitian yang membahas pengeluaran diskresioner di Indonesia, padahal pengeluaran diskresioner berperan penting dalam mendukung perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja hibah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015 (Deswantoro, et al, 2017. Penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia belum mengkonfirmasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berkaitan dengan tingkat eksposur LKPD di Indonesia (Arifin, 2018).

IPM (*Human Development Index*/HDI) sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan korporat dengan pendekatan pembangunan manusia. Untuk mendeteksi kesejahteraan korporat, CHDI (*Corporate Human Development Index*) dibangun dari HDI. Spangenberg, (2016) membawa pendekatan pembangunan manusia ke tingkat perusahaan melalui CHDI berdasarkan pemikiran Sen, (1999b). Penelitian ini menggunakan pendekatan kapabilitas manusia, pengeluaran publik, dan teori agensi. Oleh karena itu, kebaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini dengan memperluas tidak hanya pembahasan kesejahteraan

masyarakat dalam konteks makro pada pengeluaran pemerintah daerah, namun mencakup kesejahteraan korporat dalam konteks mikro pada BPD.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1.Pernyataan Masalah

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2014-2018 terdapat peningkatan IPM, persentase pengeluaran pemerintah dari total pengeluaran bidang pendidikan dengan konsistensi 20% serta perlindungan sosial 13,5%-24%, sedangkan untuk bidang kesehatan terdapat konsistensi 5% pada tahun 2016-2018 (BPS, 2021). Penelitian terdahulu berkenaan kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Uluwiyah, (2018) menunjukkan belanja pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia belum berdampak nyata terhadap program peningkatan kapabilitas manusia pada tahun 2014-2017. Kemudian, hasil penelitian Sajiah & Saputra, (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tidak efisien dalam membelanjakan anggaran kesehatan pada tahun 2016. Pengeluaran pemerintah lainnya yakni pengeluaran diskresioner berupa hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diklasifikasikan sebagai pengeluaran diskresioner (Sjahrir et al., 2013) yang diduga untuk kepentingan politik, namun ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui pengeluaran pemerintah daerah, namun juga penyaluran kredit yang disalurkan bank daerah. BPD sebagai bank daerah memiliki misi sebagai agen pembangunan yang dapat memantau kesejahteraan korporat dan keberlanjutan perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*/CG). Dalam konteks kesejahteraan korporat, studi terdahulu belum dibuktikan secara empiris khususnya berkenaan CG dengan kesejahteraan korporat. BPD perlu menggunakan nilai tambah sebagai tolok ukur kesejahteraan korporat, yakni CHDI sebagai cerminan kesejahteraan korporat.

1.2.2.Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial dan hibah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana pengeluaran diskresioner di Indonesia?
3. Apakah komisaris independen dan direktur wanita berpengaruh terhadap kesejahteraan korporat di Indonesia?
4. Bagaimana kondisi kesejahteraan korporat pada BPD di Indonesia?
5. Bagaimana penyaluran kredit yang diberikan BPD di Indonesia?
6. Bagaimana hubungan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial, dan hibah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
2. Mengeksplorasi pengeluaran diskresioner di Indonesia.
3. Menguji pengaruh komisaris independen dan direktur wanita terhadap kesejahteraan korporat pada BPD di Indonesia.
4. Menginvestigasi kondisi kesejahteraan korporat pada BPD di Indonesia.
5. Mengeksplorasi kredit yang diberikan BPD di Indonesia.
6. Mengidentifikasi hubungan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1.Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memperkaya wawasan berkenaan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ilmu ekonomi. Dalam konteks makro, penelitian ini memberikan

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teori kapabilitas manusia, teori pengeluaran publik, dan teori agensi. Dengan pendekatan teori kapabilitas manusia dan pengeluaran publik dapat menjelaskan pengujian pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial dan hibah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan eksplorasi pengeluaran diskresioner di Indonesia.

Dalam konteks mikro, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi. Pelaporan kesejahteraan korporat dalam konteks akuntansi keuangan dapat memperkaya literatur pelaporan korporat. Dengan pendekatan teori agensi dapat menjelaskan pengujian pengaruh komisaris independen dan direktur wanita terhadap kesejahteraan korporat serta eksplorasi kondisi kesejahteraan korporat.

1.4.2.Kontribusi Empiris

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris. Dengan pendekatan teori kapabilitas manusia dan teori pengeluaran publik; Pertama, memberikan penjelasan pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial, dan hibah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, memberikan penjelasan berkenaan pengeluaran diskresioner di Indonesia. Dengan pendekatan teori agensi; Ketiga, memberikan penjelasan pengaruh komisaris independen dan direktur wanita terhadap kesejahteraan korporat. Dengan pendekatan teori kapabilitas manusia; Keempat dan kelima, memberikan penjelasan berkenaan kesejahteraan korporat dan penyaluran kredit pada BPD di Indonesia. Kontribusi berikutnya, memberikan penjelasan keeratan hubungan kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan korporat di Indonesia.

1.4.3.Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai masukan bagi pemberi kebijakan dan BPD. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam pengalokasian belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hibah serta pengeluaran diskresioner khususnya berkenaan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat memetakan pengeluaran yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat dengan

berfokus pada pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bagi BPD dan perusahaan di Indonesia, sebagai masukan dalam keterlibatan komisaris independen dan direktur wanita khususnya berkenaan kesejahteraan korporat. Perusahaan dapat mengakomodir peran komisaris independen dan direktur wanita sebagai bagian tata kelola perusahaan untuk kesejahteraan korporat. Kemudian, bank dapat mengalokasikan penyaluran kredit yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian pertama yakni pendahuluan. Pendahuluan mencakup menguraikan latar belakang pentingnya penelitian, masalah, tujuan, kontribusi, dan ruang lingkup penelitian.
2. Bagian kedua yakni kondisi sosial ekonomi dan penyaluran kredit BPD di Indonesia. Tujuan bagian kedua untuk menguraikan aspek kondisi sosial ekonomi dan BPD yang berkesesuaian dengan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan korporat. Aspek tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, penduduk miskin, IPM, penyaluran kredit BPD.
3. Bagian ketiga yakni tinjauan pustaka. Tujuan bagian ketiga untuk menjelaskan teori, kajian empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.
4. Bagian keempat yakni metode penelitian. Tujuan bagian keempat untuk menguraikan pendekatan penelitian, data penelitian, metode analisis data, dan definisi operasional variabel.
5. Bagian kelima yakni hasil dan pembahasan. Tujuan bagian kelima pada bagian hasil yakni untuk memaparkan temuan yang diperoleh dari pengujian model berkenaan pendekatan kausalitas, dan menguraikan temuan sesuai tujuan penelitian berkenaan pendekatan eksploratif dan korelasional. Kemudian, pada bagian pembahasan yakni menguraikan

secara substantif berdasarkan hasil penelitian, sehingga menjadi suatu analisis yang komprehenshif.

6. Bagian keenam yakni penutup. Penutup mencakup simpulan, rekomendasi, implikasi, keterbatasan penelitian, dan rencana penelitian mendatang.